

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



DEWI UTARI
NIM: 105731110117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**
SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

DEWI UTARI
NIM: 105731110117

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021 M/1443 H**

Tgl. Inisiasi	05/01/2022
Nomor Skripsi	128
Jumlah Lembar	Smk Alumni
Harga	
Nomor Skripsi	PJ 0025/AKT/22 CP
No. Kls. M. W.	UTA
	P ²

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya. Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain Taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama [HR Tirmidzi].

Oleh karena itu
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(Q.S Al Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin,

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Orang-orang yang saya sayang dan Almamaterku

PESAN DAN KESAN

Semangat terus jangan putus asa persiapkan dengan matang pekerjaan sesuatu yang memang bisa dikerjakan hari ini jangan menunda besok besok dan besok!!.

Berusaha, Berdo'a dan Bersabar.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7/8/9/10 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang".

Nama Mahasiswa : Dewi Utari

No. Stambuk/ NIM : 105731110117

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan di depan penguji
Skripsi Strata (S1) pada tanggal 22 Desember 2021 di Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 18 Jumadil Awal 1443 H
22 Desember 2021 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

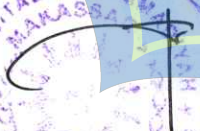

Dr.H. Andi Rustam, SE., M M.Ak.CA.CPA
NIDN: 0909096703

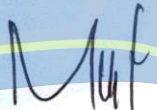

Abdul Khalid, SE., M.Ak
NIDN: 0903118803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 057


Mira, SE., M.Ak
NBM. 1 286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7/8/9/10 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: **Dewi Utari**, Nim: **105731110117** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor:0014/SK-Y/62201/091004/2021, Tanggal 18 Jumadil Awal 1443 H / 22 Desember 2021 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Jumadil Awal 1443 H
22 Desember 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muh.Rum, SE., M.Si
2. Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., AK., CA
3. Endang Winarsih, SE.M, Ak
4. Muttiarni, SE., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7/8/9/10 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Utari
Stambuk : 105731110117
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa pun.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

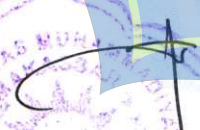
Makassar, 18 Jumadil Awal 1443 H
22 Desember 2021 M

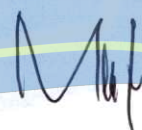
Yang Membuat Pernyataan,


Dewi Utari
105731110117
22D9CAJX620594485

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.
NBM. 651 057


Mira, SE., M.Ak
NBM. 1 286 844

ABSTRAK

DEWI UTARI, 2021. Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Bapak H. Andi Rustam, dan pembimbing II Bapak Abdul Khaliq. Penelitian ini bertujuan untuk Menguji pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Teknik analisis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD tahun 2011-2020. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistik dengan SPSS versi 24.0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan diperoleh koefisien jalur sebesar 0,640 dan pengaruh belanja modal signifikan sebesar 0,046.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

DEWI UTARI, 2021. *The Effect of Capital Expenditure on Increasing Regional Original Income in the Regional Government of Enrekang Regency Government*, Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor I Mr. H.Andi Rustam, and supervisor II Mr. Abdul Khaliq. Research aims to Testing the effect of capital expenditure on local revenue (PAD). Simultaneously or partially in Enrekang Regency. The analysis technique of this research uses descriptive quantitative and the data used in this study is the 2011-2020 APBD realization report. The calculation technique used in this study is to use statistical calculations with SPSS version 24.0. The results of the study indicate that the effect of capital expenditure on local revenue has a positive and significant effect, obtained a path coefficient of 0.640 and a significant effect of capital expenditure of 0.046.

Keywords: *Capital Expenditure, Regional Original Income*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji hanyalah milik Allah *subhanahu wa ta'ala*, Rabb semesta alam. Atas berkat Rahmat, Pertolongan dan Hidayah-Nya, tiada kata yang paling indah selain berdzikir memuji-Nya. Shalawat dan salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shallahu alaihi wa sallam* yang telah membawarahmatan lil alamin, sebagai suri tauladan di muka bumi serta penyempurna akhlak umat manusia. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang"**.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Udin T dan Ibu Sumiati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Serta kakak saya Wiwi Lestari dan Warda Alfira S.Pd yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi. Dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan baik materi maupun moral dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang

telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an., S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,M M.Ak.CA.CPA, memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Khaliq, SE.,M.Ak, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Teman-teman yang selalu menyemangati Evi Nila Sari, S.Ak., Rabiatul Adawiah, S.Ak., Rianti, S.Ak., Sinta, S.Ak., Firda Pitria, S.Ak., Gustina, S.Ak., Rillah Dien Mantika Putri.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi khususnya Angkatan 2017 kelas AK17D yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari unsur kesempurnaan disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis serta minimnya pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi fil Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 03 Jumadil Awal 1443 H
08 Desember 2021 M

Penulis,

Dewi Utari

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Belakang	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
1. Belanja Modal	7
2. Pendapatan Asli Daerah	10
B. Tinjauan Empiris	13
C. Kerangka Pikir	18

D. Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Definisi Variabel dan Operasional Variabel.....	20
D. Populasi dan Sampel.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	25
B. Hasil Penelitian	33
C. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2	Operasional Variabel	21
Tabel 4.1	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	34
Tabel 4.2	PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	36
Tabel 4.3	Deskriptif Sampel Penelitian	37
Tabel 4.4	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas	41
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.7	Uji Regresi	44

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BKAD Kab. Enrekang	35
Gambar 4.2	Uji Normalitas.....	40
Gambar 4.3	Uji Heterokedastisitas	42



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan era reformasi yang ditandai oleh pergantian rejim pemerintah yang baru dipandang concern terhadap reformasi total yang menghantarkan masyarakat Indonesia kepada kesadaran baru untuk mengubah paradigma sistem pemerintah sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi (otonomi daerah).

Kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan "bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan prioritas dan aspirasi yang berkembang di daerah. Hal ini diharapkan adanya kemandirian pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Salah satu yang dilakukan pemerintah daerah yang tercermin didalam belanja modal. Dimana belanja modal merupakan pengeluaran yang

dilakukan untuk membangun aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi atau membuka usaha didaerahnya. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-perundang, ekonomis, efektif dan efisien dan bertanggungjawab sehingga menghasilkan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan, serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi-potensi yang dimilikinya termasuk sumber daya manusia dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang potensi suatu daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Adapun Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Periode Tahun 2011 – 2020

Belanja Modal			
Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2011	138,521,597,397.00	101,765,523,496.00	73.47 %
2012	112,882,403,822.00	92,859,950,409.75	82,26 %
2013	130,684,218,179.00	103,502,560,153.00	79.20 %
2014	144,844,630,150.00	114,219,392,457.00	78.86 %
2015	323,990,191,974.00	257,924,165,935.00	79.61 %
2016	402,667,852,324.00	329,905,317,517.00	81.93%
2017	239,221,872,318.00	200,088,477,045.00	83.64%
2018	212,301,479,614.00	160,111,439,072.00	75.42 %
2019	230,273,065,363.00	163,396,969,835.00	70.96 %
2020	270,438,941,099.00	224,033,079,623.80	82.84 %
Pendapatan Asli Daerah			
Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2011	20,267,287,065.00	13,465,906,862.91	66,64 %
2012	20,554,239,507.00	17,920,619,304.26	87,19 %
2013	23,765,694,464.00	21,176,935,131.33	89.11 %
2014	37,641,158,766.00	34,997,091,444.63	92,98 %
2015	55,587,486,754.00	49,214,800,279.44	88.54 %
2016	76,863,375,385.00	66,383,446,988.00	86,37 %
2017	136,152,091,582.00	99,669,276,952.37	73.20 %
2018	129,615,126,867.00	56,043,333,304.23	43.24 %
2019	134,973,760,140.00	73,239,444,538.35	54.26 %
2020	118,959,749,845.00	78,247,324,549.96	65.78 %

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui adanya fenomena bahwa Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang selama 10 tahun dari

2011-2020 mengalami ketidakstabilan dikarenakan belanja modal pada tahun 2011-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Belanja modal pada tahun 2016 merupakan belanja modal tertinggi yakni Rp. 329,905,317,517.00. Belanja modal tertinggi kedua yakni tahun 2015 sebesar Rp 257.924.165.935,00. Sedangkan pada tahun 2012 belanja modal Rp 92.859.950.409,75 dan selanjutnya diikuti kedua terendah yakni tahun 2011, belanja modal sebesar Rp 101.765.523.496,00. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang gagal mencapai target PAD pada tahun 2020 yaitu 65,78 persen atau sebesar Rp 78,25 M dan yang ditargetkan mencapai Rp118,959 M. Realisasi PAD tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu PAD yang dihasilkan hanya mencapai Rp 73.23 M atau 54,26% dari target yang dibebankan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas melihat pentingnya pertumbuhan dan peningkatan ekonomi bagi suatu daerah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam perihal pertumbuhan kinerja keuangan dengan judul mengenai “ **Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diidentifikasi adalah: “Apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penellitian ini untuk menemukan suatu cara meningkatkan pendapatan asli daerah kisaran belanja oleh pemerintah

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya maka dapat ditinjau dari belanja modal setiap tahun anggran

b. Bagi Akademik

Bagi peneliti lanjutan tambahan referensi dikalangan akademik dalam melakukan penelitian sejenis dan mengembangkannya dimasa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Belanja Modal

1.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dapat diartikan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada, sifatnya menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah dalam perihal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset tetap atau kekayaan daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja Modal menurut hoesada (2016) merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat atau perorangan karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik.

Belanja Modal menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 digunakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan aset belanja yang bersifat rutin misalnya biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat.

1.2. Jenis-jenis Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang dilakukan dengan biaya tertentu untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan

pengeluaran lainnya yang berhubungan untuk memperoleh hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai supaya manfaatnya bisa segera didapatkan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kualitas peralatan atau mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional usaha.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk kegiatan dalam hal pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan siap digunakan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk penambahan, dan penggantian, peningkatan masa manfaat pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan hingga dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan,

penambahan, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan, adapun yang termasuk dalam belanja ini yaitu barang purbakala, tanaman, hewan ternak.

2. Pendapatan Asli Daerah

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang bersumber daerahnya sendiri bertujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya yang umumnya dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah menurut darwanis (2014) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah menurut farah (2017) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari

pendapatan daerah yang diberikan untuk mengelolah sumber keuangan yang akan terus dipacu.

Dari pengertian diatas mengenai pengertian PAD dapat ditarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang diperolehnya yang dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

2.3. Sumber-sumber Pendapatan asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pasal 157 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi, yang berasal dari iuran wajib pribadi atau badan kepada suatu daerah.

2) Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol.

3) Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis kekayaan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Sumber penerimaan daerah yang menjadi pemasukan Pendapatan daerah lainnya yang sah yaitu: Hasil penjualan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, dan Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, potongan.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Siska Dwi Hastuti (2018)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa “pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan, belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah”.
2.	Darwis dan ryanda Saputra (2014)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan	Metode yang digunakan yaitu Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa “belanja modal berpengaruh positif dan signifikan

		Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)		terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan secara langsung, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah".
3.	Ahmad Fajri (2016)	Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera	Metode yang digunakan metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan "tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi"
4.	Asnidar dan Novia Sintia Hardi (2019)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Metode Kuantitatif dengan metode Kuantitatif	Hasil penelitian Menunjukkan "terdapat pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan"
5.	Ansor Wibowo, Monalisa (2019)	Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten	Metode penelitian yang digunakan penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap

		Bengkalis		pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel <i>intervening</i> "
6.	Mulia Andirfa, Dr.Hasan Basri, M.Com,CA dan Dr.M.Shabri A.Majid, SE,M.Ec (2016)	Pengaruh Belanja Modal , Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Penelitian ini menggunakan Analisis kuantitatif	Hasil penelitian dengan menggunakan menunjukkan bahwa Belanja Modal , Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja daerah, dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi aceh.
7.	Akhmad Imam Amrozi (2016)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan	Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Kuantitatif	Hasil penelitian "belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli

		Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur		daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan rasio kemandirian dan kemampuan mobilisasi daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan efisiensi pengeluaran anggaran dan sisa pengeluaran anggaran.
8.	Prima Rosita Arini S (2016)	Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di pulau Kalimantan.	Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least Aquare	Hasil penelitian ini menemukan Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
9.	Novita sari, Benny Rojeston Mamaek Nainggolan, Rosma ariyanti purba, taruli	Pengaruh Belanja Modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja	Metode penelitian yang digunakan pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan relevan dengan kinerja keuangan di

	Br Saragih, Wahy Banjarnahor (2020)	keuangan		provinsi sumatera utara tahun 2014- 2017. Secara parsial, belanja modal dan pendapatan asli daerah berdampak relevan kepada kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi sumatera utara tahun 2014- 2017.
10.	Ni Luh Putu Lindri Puspitasasri (2021)	Pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel <i>intervening</i>	Penelitian yang digunakan Metode Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel <i>intervening</i>

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibentuk untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terhadap kerangka konsep yang menggambarkan proses dan tujuan penelitian. Adapun kerangka konsep yang memperlihatkan pengaruh dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka konsep penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan Tinjauan pustaka dan Kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut adapun hipotesis yang diduga dari penelitian ini antara lain:

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,

gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhadi Belanja Modal memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (Nugroho, 2012). Untuk meningkatkan dan menggali belanja modal pemerintah daerah yang merupakan perkara yang sangat penting untuk menaikkan produktifitas perekonomian sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan semakin besar alokasi belanja modal pada periode berikutnya. Sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik pada peningkatan pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ketahun., 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini berkaitan dengan informasi menggunakan angka-angka dan program statistik yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi/tempat penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Enrekang tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No.1 Enrekang Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, yang dimulai bulan Juli sampai Agustus 2021.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Variabel

- a. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak bewujud.

- b. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerahnya sendiri berupa dana yang dipungut berdasarkan peraturan daerahnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Belanja Modal (Variabel Independen)	Belanja modal merupakan pengeluaran rutin untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode yaitu belanja modal yang dimaksud berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tetap lainnya.	Belanja Tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan belanja aset tetap lainnya.	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Variabel Dependen)	Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.	Rasio

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Enrekang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang dari tahun 2011-2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumen. Metode pencatatan adalah pengumpulan data dengan mengambil foto, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian sugyono (2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data gambaran pengelolaan keuangan daerah kabupaten Enrekang dan Kerangka pembiayaan daerah yang diperoleh dari BKAD.

F. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah perhitungan dengan menggunakan:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan “untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya” (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan kinerja keuangan daerah, pendapatan asli dan belanja modal.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan ujiasumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas terhadap laba.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan “untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan terdistribusi normal atau terdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variable bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali” (Dewi, 2018).

Pada penelitian ini dilakukan dengan menguji normalitas menggunakan normal probability plot, dan menggunakan *One Sample Kolmogorov – Smirnov test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal, sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan tidak normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada pengujian dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (scatter-plot) antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut uji heteroskedastisitas..

c. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian digunakan “untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi” (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini nilai tolerance dan V_i digunakan untuk

mendeteksi adanya masalah multikolinearitas. Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama nilai VIF tinggi ($VIF = 1/\text{tolerance}$). Apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$, maka telah terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama dan Sejarah Singkat Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang

Salah satu lembaga pemerintah kabupaten enrekang di bentuk berdasarkan peraturan daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang pembentukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang.

Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 1999 didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah kabupaten enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga pemerintah kabupaten enrekang sesuai kebutuhan.

Penyelenggaran pemerintah diperlukan adanya perubahan selain merupakan tuntutan yang mengharuskan pemerintah yang lebih responsive, transparan dan akuntabel juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi :

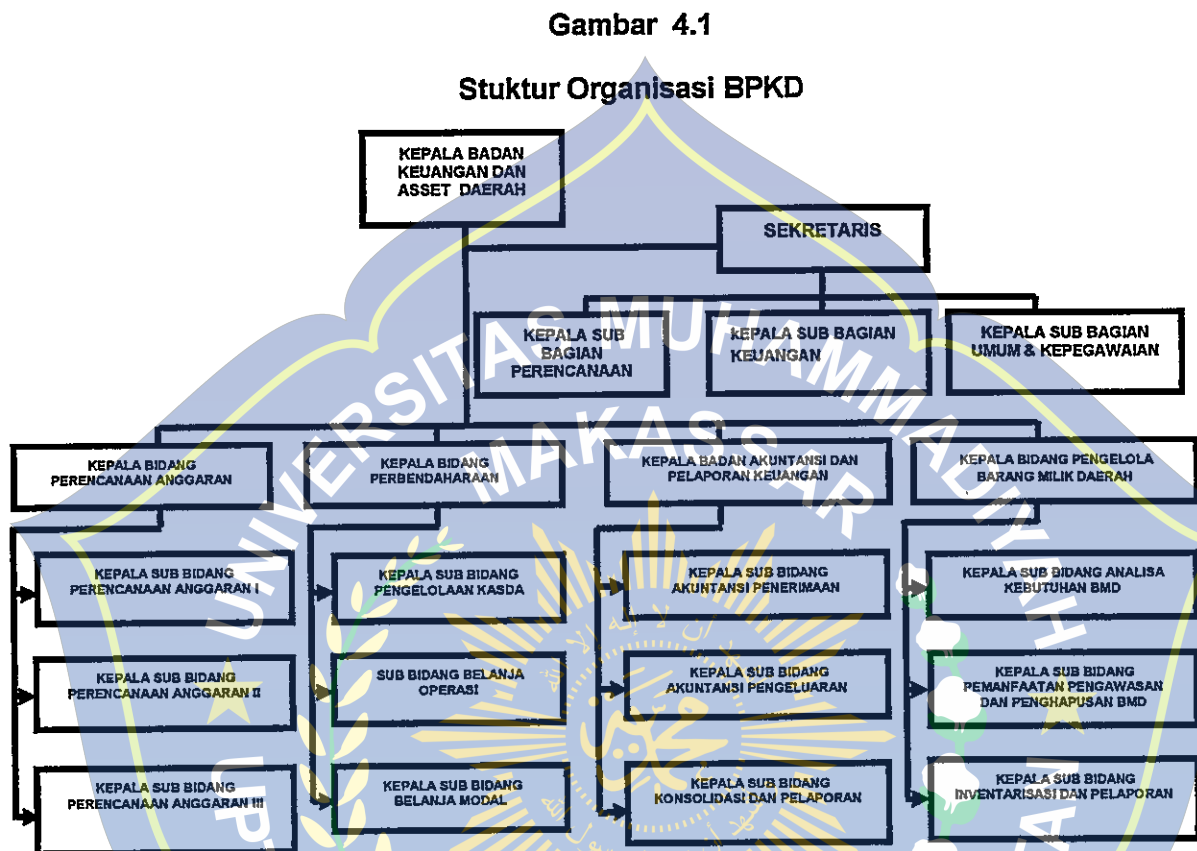
"Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan akuntabel, untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman, dan sejahtera."

b. Misi :

- a) Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
- b) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Meningkatkan sumber daya aparatur penatausahaan pengelola keuangan dan aset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi BKAD Kab. Enrekang

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah



1. Susunan dan Tugas Pokok (Job Description) Organisasi Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang terdiri dari:

1) Kepala BKAD

Badan Keuangan Dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akutansi. Kepala Badan Keuangan Dan Asset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk kepada Sekretariat dan Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinir kegiatan Sekretariat dan Kepala Bidang lingkup Badan Keuangan Dan Asset Daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, konsep naskah dinas, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat undangan, nota dinas, disposisi dan daftar hadir serta surat-surat lainnya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah serta unsur terkait.
- e. Melaksanakan konsultasi baik secara horizontal maupun dengan instansi yang lebih tinggi.
- f. Menetapkan rencana strategis badan berdasarkan RPJM, Visi dan Misi serta program Bupati di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- g. Menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup badan.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- j. Melaksanakan fungsi Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- k. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- l. Melaksanakan fungsi Bendahara Anggaran dan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- m. Menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
- n. Menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan APBD.
- o. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- p. Melakukan evaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan pengelola keuangan daerah.
- q. Melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah.
- r. Menilai dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Keuangan Dan Asset Daerah.

- a. Sub Bagian Perencanaan: Sub bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

melakukan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program / kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- b. Sub Bagian Keuangan: Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Anggaran. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Anggaran yaitu:

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I
- b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran II
- c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran III

4) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis Bidang

Pengelolaan kas, belanja tidak langsung dan pembiayaan dan belanja modal. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Perbendaharaan yaitu :

- a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kasda
- b. Kepala Sub Bidang Belanja Operasi
- c. Kepala Sub Bidang Belanja Modal

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu:

- a. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan: Sub bidang Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan tugas lingkup Sub bidang Akuntansi Penerimaan.
- b. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran: Sub bidang Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Sub bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam lingkup Sub bidang Akuntansi Pengeluaran.
- c. Kepala Sub Bidang Konsolidasi dan Pelaporan: Sub bidang Konsolidasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan

pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis Bidang Konsolidasi dan Pelaporan.

6) Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :

- a. Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Kepala Sub Bidang Analisa Pemanfaatan, Pengawasan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- c. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

B. Hasil Penelitian

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk menguji secara empiris tentang pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

1. Statistic Data

Catatan Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas. Adapun komponen data penelitian sebagai berikut :

a. Komponen Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh asset tetap dan aset lainnya untuk keperluan-keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun komponen belanja modal berdasarkan kebijakan keuangan tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Periode Tahun 2011– 2020

Tahun	BELANJA MODAL					Total Belanja Modal
	Belanja Tanah	Belanja Peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bagunan	Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	
2011	612,430,700	13,412,760,449	29,783,494,721	52,075,068,476	5,881,769,150	101,765,523,496
2012	270,164,500	6,417,865,045	29,127,726,960	55,506,318,605	1,537,875,300	92,859,950,410
2013	88,328,000	19,188,638,130	28,962,088,269	54,618,678,754	644,827,000	103,502,560,153
2014	100,756,000	16,122,822,340	28,742,475,337	69,034,650,780	218,688,000	114,219,392,457
2015	122,119,500	26,322,087,470	83,751,401,877	147,720,077,088	8,480,000	257,924,165,935
2016	641,500,000	36,801,643,846	48,386,453,802	243,778,683,369	297,036,500	329,905,317,517
2017	548,080,000	28,871,268,774	44,110,599,986	126,522,778,285	35,750,000	200,088,477,045
2018	360,948,800	15,238,011,667	33,936,537,672	108,047,025,576	2,528,915,357	160,111,439,072
2019	624,700,000	17,985,957,828	57,856,972,980	83,388,552,403	3,540,786,624	163,396,969,835
2020	0.00	28,995,654,444	76,880,151,268	107,748,514,036	10,408,759,876	224,033,079,624

Sumber: Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan dari tabel 4.1 dapat diuraikan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2011–2020 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 101.765.523.496 atau 73,47% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 138.521.597.397
- b. Pada tahun 2012 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 92.859.950.410 atau 82,26% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 112.882.403.822
- c. Pada tahun 2013 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 103.502.560.153 atau 79,20 % dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 130.684.218.179

- d. Pada tahun 2014 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 114.219.392.457 atau 78,86% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 144.844.630.150
- e. Pada tahun 2015 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 257.924.165.935 atau 79,61% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 323.990.191.974
- f. Pada tahun 2016 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 329.905.317.517 atau 81,93% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 402.667.852.324
- g. Pada tahun 2017 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 200.088.477.045 atau 83,64% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 239.221.872.318
- h. Pada tahun 2018 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 160.111.439.072 atau 75,42% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 212.301.479.614
- i. Pada tahun 2019 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 163.396.969.835 atau 70,96% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 230.273.056.363
- j. Pada tahun 2020 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 224.033.079.623,80 atau 82,84% dari yang di anggarkan belanja modal sebesar Rp 270.438.941.099

b. Komponen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Komponen pendapatan asli daerah berdasarkan kebijakan keuangan tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Periode Tahun 2011– 2020

Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-Lain PAD yang sah	
2011	1,910,401,016	3,820,111,363	2,792,133,210	4,943,261,274	13,465,906,863
2012	2,999,321,102	6,897,025,547	2,892,049,663	5,132,222,992	17,920,619,304
2013	3,413,931,005	9,330,797,320	2,770,422,551	5,661,784,255	21,176,935,131
2014	6,071,708,609	13,393,457,919	2,912,293,695	12,619,631,222	34,997,091,445
2015	7,340,370,536	15,557,657,681	3,387,902,300	22,928,869,763	49,214,800,279
2016	10,147,403,707	23,878,129,053	9,826,158,746	22,531,755,483	66,383,446,989
2017	9,023,051,580	26,3044,548,348	12,355,808,162	52,245,868,862	99,669,276,952
2018	10,843,118,014	21,673,949,306	11,596,908,237	11,929,357,747	56,043,333,304
2019	10,523,206,720	30,088,455,358	16,741,119,760	15,873,034,200	73,225,816,038
2020	12,592,294,716	35,461,343,205	15,412,302,384	14,781,384,245	78,247,324,550

Sumber: Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan dari tabel 4.2 dapat diuraikan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2011- 2020 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 13.465.906.863 atau 66,44% dari rencana penerimaan sebesar Rp 20.267.287.065
- b. Pada tahun 2012 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 17.920.619.304 atau 87,19% dari rencana penerimaan sebesar Rp 20.554.239.507
- c. Pada tahun 2013 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 21.176.935.131 atau 89,11% dari rencana penerimaan sebesar Rp 23.765.694.464

- d. Pada tahun 2014 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 34.997.091.445 atau 92,98 % dari rencana penerimaan sebesar Rp 37.641.158.766
- e. Pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 49.214.800.279 atau 88,11% rencana penerimaan sebesar Rp 55.857.486.754
- f. Pada tahun 2016 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp66.383.446.989 atau 88,29% dari rencana penerimaan sebesar Rp 76.863.375.385
- g. Pada tahun 2017 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 99.669,276,952 atau 73,20% dari rencana penerimaan sebesar Rp 136.152.091.582
- h. Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 56,043,333,304 atau 50,95% dari rencana penerimaan sebesar Rp 129.615.126.867
- i. Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 73.225.816.038 atau 54,26% dari rencana penerimaan sebesar Rp 134.973.760.140
- j. Pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp 78.247.324.550 atau 65,78% dari rencana penerimaan sebesar Rp 118.959.749.845

c. Komponen Deskriptif Sampel Penelitian

Dari hasil perhitungan komponen belanja modal, komponen pendapatan asli daerah, Adapun Deskriptif Sampel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Komponen Deskriptif Sampel Penelitian

Tabel	Variabel	
	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah
2011	101,765,523,496	13,465,906,863
2012	92,859,950,410	17,920,619,304
2013	103,502,560,153	21,176,935,131
2014	114,219,392,457	34,997,091,445
2015	257,924,165,935	49,214,800,297
2016	329,905,317,517	66,383,446,989
2017	200,088,477,045	99,669,276,952
2018	160,111,439,072	56,043,333,304
2019	163,396,969,835	73,225,816,038
2020	224,033,079,624	78,247,324,550

Sumber: Data Diolah Penulis (2021)

Adapun Analisis data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan analisis data seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standard deviation dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

1. Hasil analisis statistic deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	10	9.29E+10	3.30E+11	1.7478E+11	7.83000E+10
Pendapatan Asli Daerah	10	1.35E+10	9.97E+10	5.1036E+10	2.89051E+10
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Hasil olahan Data SPSS 24, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh Nilai rata-rata (mean) dari belanja modal pemerintah daerah kabupaten Enrekang adalah Rp 1.7478E11 dengan standar deviasi sebesar Rp 7.83000E+10 Nilai (terendah) dari belanja modal adalah Rp 92.859.950.409,75 pada tahun 2012 sedangkan nilai maksimum dari belanja modal adalah Rp 329.905.317.517 tahun 2016.

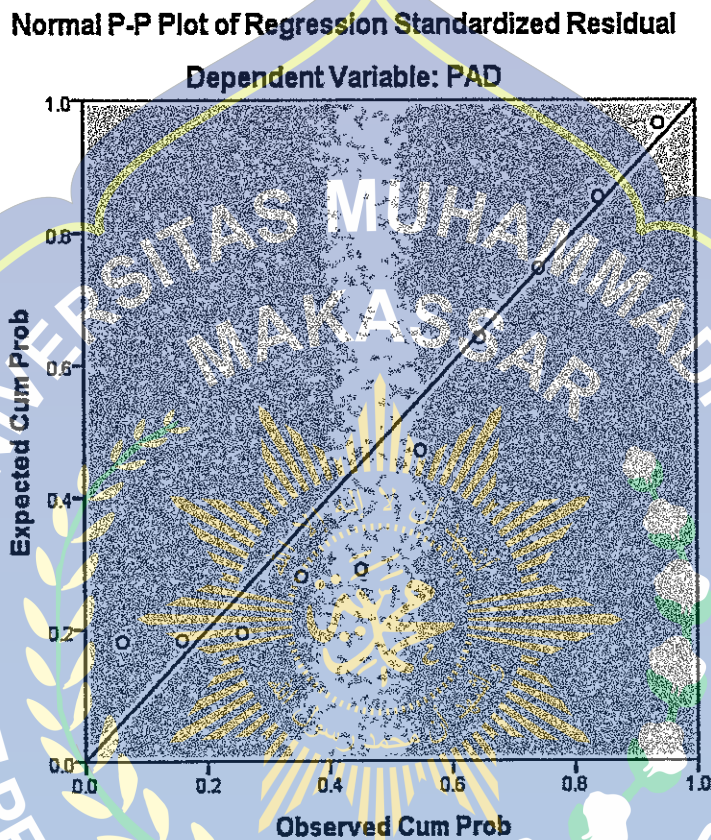
Nilai rata-rata (mean) dari pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Enrekang adalah 5.1036E10 dengan standar deviasi sebesar 2.89051E10. Nilai terendah (minimum) dari pendapatan asli daerah Rp 13.465.906.862,91 pada tahun 2011 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari pendapatan asli daerah adalah Rp 99.669.276.952 pada tahun 2017.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pada penelitian ini dilakukan dengan mengujian normalitas menggunakan normal probability plot, dengan taraf yang digunakan masing-masing variabel menghasilkan nilai $p >$

0,05. Jika yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal, sebaliknya jika yang dihasilkan $< 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan tidak normal. Hasil uji normalitas sebagai berikut terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini :



Gambar 4.2

UJI NORMALITAS

Sumber : Hasil olahan Data SPSS 24, 2021

Berdasarkan pada gambar 4.2 Dari normal probability menunjukkan bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menguji nilai residual dengan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menguji distribusi residual normal atau tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas sebagai berikut pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
HASIL UJI NORMALITAS (K-S TEST)

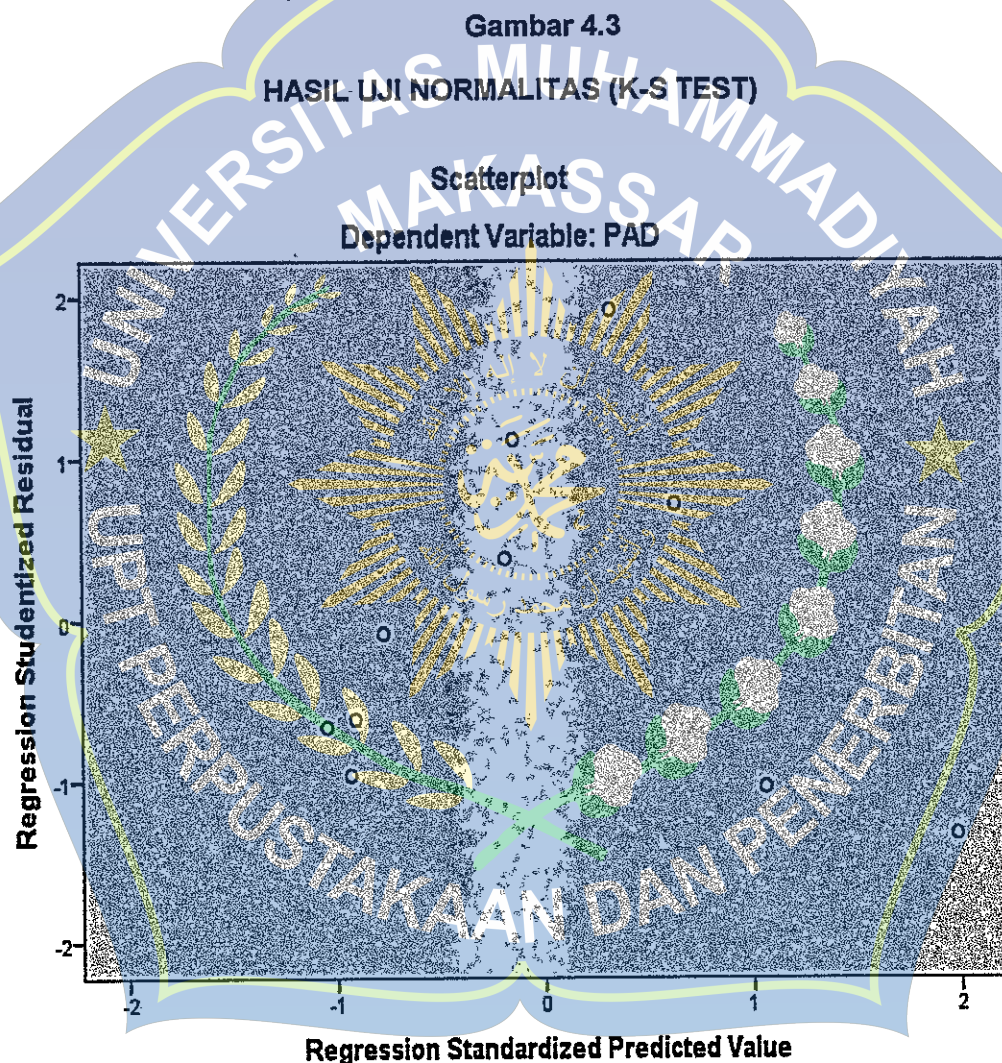
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	22216038860.00000
Most Extreme Differences	Absolute	.221
	Positive	.221
	Negative	-.167
Test Statistic		.221
Asymp. Sig. (2-tailed)		.181 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil olahan Data SPSS 24, 2021

Tabel 4.5 menunjukkan Nilai K-S sebesar 0,221 (sig0,181) untuk semua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel belanja modal, pendapatan asli daerah, secara statistik berdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik scatter plot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti pada gambar 4.3 dibawah ini:



Sumber : Hasil olahan Data SPSS 24, 2021

Berdasarkan Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0

pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya gejala *heteroskedastitas* atau HO diterima yang berarti model regresi ini layak untuk memprediksikan variable dependen berdasarkan masukan variabel independen.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat adanya korelasi antara variable bebas (*independen*). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4.6
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Belanja Modal	1,000	1,000
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah			

Sumber : Hasil olahan Data SPSS 24, 2021

Berdasarkan table 4.6 dapat disimpulkan bahwa nilai Tolerance semua variable lebih besar 0,05 (>5%) serta nilai VIF semua variable independen lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$). Maka artinya tidak terjadi *multikolinearitas* terhadap data yang diuji.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.7

Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9762849742	1.905E+10		.512
	Belanja Modal	.236	.100	.640	.046

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Hasil olahan Data SPSS 24, 2021

Berdasarkan perhitungan path analysis, pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah diperoleh koefisien jalur sebesar 0,640 dan pengaruh belanja modal signifikan 0,046 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena $0,046 < 0,05$ maka H1 diterima.

C. PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Dari gambar 4.7 diperoleh koefisien jalur sebesar 0,640 dan pengaruh belanja modal signifikan 0,046 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin besar belanja modal yang dibelanjakan dapat mendukung meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatnya belanja modal berarti pemerintah meningkatkan infrastruktur berupa pembangunan sarana dan prasarana publik sehingga akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan menarik investor yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2012 meningkat sebesar Rp 4.454 M, kemudian tahun 2013 ke Tahun 2014 sebesar Rp 3.256 M, kemudian tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar Rp 14.217, tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar Rp 7.168 kemudian tahun 2016 ke tahun 2017 Rp 33.286 kemudian tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami selisih sebesar Rp 33.626 M kemudian 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar Rp 7.182 M, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 pendapatan asli daerah juga meningkat sebesar Rp 5.021 M.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu Belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah diperoleh koefisien jalur sebesar 0,640 dan pengaruh belanja modal signifikan 0,046 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal berpengaruh positif dan signifikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah kabupaten enrekang yaitu:
Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memperkuat porsi belanja modal bukan hanya berlaku Pemda Enrekang tapi seluruh Pemerintah Daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomis untuk meningkatkan belanja daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah bukan hanya ditinjau dari segi belanja modal tetapi dapat ditinjau dari faktor – faktor lain seperti peningkatan SDM, sumber daya fisik dan peningkatan potensi ekonomi sebagai sumber utama pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amrozi, A. I. (2016). pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur). *jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi*, 1 (1), 1-12.
- Darwanis, R. s. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jur'nal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2), 183-199.
- Fajar Nugroho, A. R. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Journal Of Accounting*, 1 (2), 1-14.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di sumatera. e- *Jumal Prespektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5, 29-35.
- Hardi, A. d. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jumal Samudra Ekonomika*, 3, 9-18.
- Hoesada, J., (2016). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2002, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: Bumi aksara.
- Monalisa, A. W. (2019). pengaruh belanja modal, dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten bengkalis. *Jumal Akuntansi Syariah*, 5 (2), 212-225.
- Muh. Resa Saputra, H. d. (2021). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan Ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Jumal bisnis dan akuntansi kontemporer*, 14 (2), 129-134.
- Mulia Andirfa, D. H. (2016). pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten kota di provinsi aceh. *Jumal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5 (3), 30-38.
- Novita Sari, b. r. (2020). pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. *journal of economic, business and accounting*, 4 (1), 219-223.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Belanja Modal*

Permendagri No. 13 Tahun 2006 *tentang Belanja Modal*

Prof. Dr. Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, Edisi ke-21. Alfabeta, CV. Jl. Gegerkalong Hiir No. 84 Bandung.

Prof. Dr. Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*, Edisi ke-25. Alfabeta, CV. Jl. Gegerkalong Hiir No. 84 Bandung.

Siska Dwi Hastuti. 2018. *Pengaruh Belanja Modal terhadap pendapatan Asli Daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan selayar. Skripsi Sarjana Ekonomi Dan Bisnis (S1). Universitas Muhammadiyah Makassar.*

S, P. r. (JRAMB, prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta). *pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau kalimantan*. 2 (2), 180-198.

Sugiyono, 2011. *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Pendapatan Asli Daerah*







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomer : 1332/05/C.4-II/VII/42/2021
Lamp :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 12 Juli 2021 M

Kepada Yth.
Baitan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dewi Utari
Stambuk : 105731110117
Jurusan : AKUNTANSI

Judul Penelitian : Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih

Dr. H. Andi Jamsari, S.E., M.Si
NBM 651507

Jl. Sultan Alaudin No.259 HP: 085230300264 Telp. 0411-865972 Fax. 0411-865388 Makassar 90221
Menara Info Lantai 7 Kampus Talakaleng Makassar - Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
(B K A D)**

Jalan. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0420) 21086 Fax 21921

ENREKANG

91712

Enrekang, 22 Juli 2021

Nomor : 990/136/III/BKAD/2021

Lamp. : -

Perihal : Bersedia Menerima Penelitian

Vth. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

di-
Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu Nomor : 327/DPMP1SP/IP/VII/2021, Tanggal, 22 Juli 2021 Perihal Izin Penelitian,
atas Nama :

Nama : **Desi Utari**
Tempat Tanggal Lahir : Kalosi, 16 November 1999
Alamat : Parang Kel, Kalosi Kec. Alla

pada prinsipnya Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang (BKAD),
bersedia menerima Penelitian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD),
terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021 s/d 22 September 2021 dalam rangka Penyusunan
Skripsi dengan judul **" Pengaruh Zelasja Modal terhadap Pendapatan Asli
daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang ."**

Demikian surat ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

W. Th. **KEPALA BKAD**
SEKRETARI

PERMADIAN, S.E.M.A.P. =

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19800705 200804 1 002


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 22 Juli 2021

Nomor : 327/DPMPTSP/IP/VII/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Titin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala BPKD Kab. Enrekang
 Di
 Enrekang

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 4128/05/C.3-VIII/VII/40/2021 tanggal 12 Juli 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dewi Utari
 Tempat Tanggal lahir : Kalosi, 30 November 1999
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Pecorok Kel. Kalosi Kec. Alia

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 22 Juli 2021 s/d 22 September 2021.

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut atas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan进度 kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diuraikan.
3. Menaat semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotokopi hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Dp. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
 Pdt. Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang

SYAMSUDDIN, S.Pt. M.Si
 Pangkajene, 22 Juli 2021
 NIP. 197101012005031007

Terlampir:-

01. Bupati Enrekang (Berbagai capstans)
02. Kepala BAKESGANG-POL Kab. Enrekang
03. Camat Enrekang
04. Ketua PANT Universitas Muhammadiyah Makassar
05. Yang Berkepentingan (Dewi Utari)
06. Bertanggung

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TIRUHAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010
 (DITILAI AUDIT)

(dalam rupiah)						
No.	Uraian	Kef	Anggaran 2011	Realisasi 2011	1%	Realisasi 2010
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Asli Daerah	V.5.1.1.a.31	1.904.000.000,00	1.020.401.818,00	53,60	1.443.157.466,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.5.2.1.a.31	5.474.838.965,00	3.870.111.943,00	70,50	5.399.718.989,00
5	Pendapatan Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang	V.5.2.1.a.31	2.827.815.800,00	2.792.188.210,00	98,77	2.827.815.800,00
6	lainnya yang sah	V.5.2.1.a.41	4.690.422.500,00	4.942.791.273,91	105,37	5.138.038.507,54
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		20.287.287.065,00	13.485.393.242,91	66,48	24.608.730.663,08
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAERAH PERimbangan					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.2.1.b.31	46.565.282.700,00	32.758.442.748,00	70,25	32.729.276.406,00
11	Dana Bagi Hasil Sektoral Dana Alokasi (DBA)					
12	Dana Alokasi Umum	V.5.2.1.b.31	807.834.018.000,00	802.944.058.000,00	100,00	244.108.985.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	V.5.2.1.b.31	42.164.000.000,00	47.169.000.000,00	112,09	42.100.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		891.668.340.700,00	882.761.560.748,00	99,00	310.933.581.406,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAHAPITA					
16	Dana Ombudsman Khusus					
17	Dana Penunjang	V.5.2.1.b.31	155.014.470.000,00	175.577.275.535,00	113,26	91.932.444.181,00
18	lainnya		125.014.459.900,00	127.377.525.535,00	102,69	91.902.644.181,00
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		280.028.869.900,00	302.954.801,07	108,18	183.836.628.362,00
20	Pendapatan Asli Daerah	V.5.2.1.b.31	7.100.000.000,00	10.637.885.801,35	149,82	7.747.869.750,75
21	Pendapatan Asli Daerah					
22	Jumlah Pendapatan Transfer		280.028.869,90	302.954.801,35	108,18	183.836.628,36
23	Total Pendapatan Transfer		891.668.340,70	882.761.560,75	99,00	310.933.581,41
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
25	Pendapatan Lain-lain					
26	Pendapatan Dana Darurat					
27	Pendapatan Lainnya	V.5.2.1.c	12.932.045.682,00	12.761.254.104,00	98,68	10.934.519.218,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		12.932.045,68	12.761.254,10	98,68	10.934.519,22
29	Jumlah Pendapatan		337.392.392,89	333.295.386,19	98,79	404.770.229,74
30	BELANJA					
31	BELANJA OPERASI					
32	Belanja Pegawai	V.5.2.2.a.1	302.304.16.349,00	301.673.021.751,20	99,79	262.235.964.319,00
33	Belanja Barang dan Jasa	V.5.2.2.a.2	49.261.700.973,00	47.267.928.478,00	96,15	61.198.275.621,00
34	Belanja Lain-lain	V.5.2.2.a.3	710.000.000,00	710.000.000,00	100,00	1.878.000.000,00
35	Belanja Modal	V.5.2.2.a.4	1.050.000.000,00	1.047.197.000,00	99,73	1.250.000.000,00
36	Belanja Lain-lain	V.5.2.2.a.5	6.150.000.000,00	5.908.809.245,00	96,07	9.145.102.297,00
37	Jumlah Belanja Operasi	V.5.2.2.a.6	430.607.717.321,00	401.511.119.468,00	93,24	312.344.272.933,00
38	BELANJA MODAL					
39	Belanja Modal	V.5.2.2.b	2.721.439.800,00	417.430.700,00	15,33	909.243.800,00
40	Belanja Perawatan dan Pemeliharaan	V.5.2.2.c	15.709.411.000,00	17.412.766.449,00	111,48	18.465.015.335,00
41	Belanja Lain-lain dan Lain-lain	V.5.2.2.d	42.970.500.721,00	24.188.484.721,00	56,31	11.903.065.475,00
42	Belanja Lain-lain dan Lain-lain	V.5.2.2.e	12.000.817.612,00	21.075.268.478,00	175,61	48.032.507.065,00
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.5.2.2.f	6.502.928.800,00	5.681.769.197,00	87,38	618.434.487,00
44	Belanja Aset Lainnya	V.5.2.2.g				
45	Jumlah Belanja Modal		138.521.597.397,00	181.345.523.498,00	130,95	100.345.246.739,00

No.	Uraian	Ref	Anggaran 2011	Realisasi 2011	(%)	Realisasi 2010
47	DEKAMBAKAR FORTUGA					
48	Madura Tak Terungkap	V 5.2.2	1.150.000.000,00	1.264.271.100,00		247.426.540,00
49	Jumlah Belanja Tak Terungkap 1541		1.150.000.000,00	1.264.271.100,00		247.426.540,00
50	TRANSKRIPT/BAK HASIL KEDISI					
51	Pada Masa Pijak					
52	Klasifikasi dan Rincian					
53	Alasan Rincian Detail	V 5.2.2 d	12.573.000.000,00	12.543.928.345,00	99,81%	11.542.819.000,00
54	Jumlah Belanja Transfer		12.573.000.000,00	12.543.928.345,00	99,81%	11.542.819.000,00
55	Jumlah Belanja		561.852.314.718,00	578.874.932.504,00	102,85%	545.379.861.217,21
56	Jumlah Belanja		14.049.000.000,00	23.358.053.685,00	166,28%	19.876.864.565,13
57	PEMBAYARAN					
58	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN					
59	Pembayaran yang telah diterima dan digunakan	V 5.2.2 a 1	10.542.072.000,00	7.422.508.999,96	70,41%	4.792.532.914,37
60	Pembayaran yang diterima dan digunakan		25.314.544.000,00			
61	Pembayaran yang diterima dan digunakan		2.000.000.000,00	2.375.000.000,00	118,75%	9.841.240.044,00
62	Pembayaran yang diterima dan digunakan					
63	Pembayaran yang diterima dan digunakan	V 5.2.2 a 2	25.314.544.000,00	23.346.477.060,96	92,23%	8.844.774.678,87
64	Jumlah Pembayaran		25.314.544.000,00	23.346.477.060,96	92,23%	8.844.774.678,87
65	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN					
66	Pembayaran yang diterima dan digunakan					
67	Pembayaran yang diterima dan digunakan					
68	Pembayaran yang diterima dan digunakan					
69	Pembayaran yang diterima dan digunakan					
70	Pembayaran yang diterima dan digunakan					
71	Pembayaran yang diterima dan digunakan	V 5.2.2 a 3	24.604.000.000,00	23.149.000.000,00	94,09%	2.775.643.435,00
72	Pembayaran yang diterima dan digunakan		24.604.000.000,00	23.149.000.000,00	94,09%	2.775.643.435,00
73	Jumlah Pembayaran		4.869.000.000,00	4.811.000.000,00	98,83%	5.888.130.198,00
74	Jumlah Pembayaran	V 5.2.4	10.500,00	7.523.455.464,94	716,51%	16.512.996.748,50



2.184

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011
 (SISTEM AUDIT)

(dalam rupiah)						
NO	URAIAN	2011	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	%	REALISASI 2011
1	PENDAPATAN	5.2.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1.1	1.354.000.000,00	7.900.311.102,00	151,78%	1.910.450.016,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.1.2	3.173.831.400,00	2.997.075.517,00	77,07%	1.875.111.347,00
5	Denda/penalti	5.2.1.1.3	2.827.815.000,00	2.997.009.862,00	56,78%	2.742.243.210,00
6	Lain-lain PAD asli daerah	5.2.1.1.4	6.600.617.400,00	3.132.737.017,77	77,59%	8.964.261.274,01
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		20.554.219.500,00	17.020.619.500,78	87,19%	13.492.068.847,01
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAERAH PERKEMBANGAN	5.2.1.2.1				
10	Dana Alokasi Umum	5.2.1.2.1.1	85.000.000.000,00	31.277.316.015,00	63,49%	57.758.417.388,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2.1.2.1.2	4.191.000.000,00	3.872.647.381,00	100,00%	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sektoral	5.2.1.2.1.3	164.233.100.000,00	704.372.101.000,00	120,00%	122.034.058.233,00
13	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.1.4	27.174.000.000,00	48.218.740.740,00	100,00%	42.850.000.000,00
14	Akumulasi Pengalihan Transfer		468.579.100.000,00	458.158.098.574,00	99,81%	316.751.930.348,00
15	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - DAERAH	5.2.1.2.2				
16	Dana Bantuan Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
17	Dana Pembiayaan	5.2.1.2.2.1	52.270.000.000,00	52.270.000.000,00	100,00%	174.427.225.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		52.270.000.000,00	52.270.000.000,00	100,00%	174.427.225.000,00
19	PENDAPATAN	5.2.1.3				
20	Pendapatan Asli Daerah	5.2.1.3.1	11.000.000.000,00	32.400.245.412,11	115,47%	10.617.398.920,51
21	Pendapatan Asli Daerah	5.2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
22	Pendapatan Asli Daerah	5.2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Transfer		11.000.000.000,00	11.890.645.417,47	115,37%	10.617.398.920,51
24	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - DAERAH	5.2.1.3.2				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah		0,00	0,00	0,00%	0,00
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah		0,00	0,00	0,00%	0,00
27	Bantuan Keuangan dari Pemerintah		0,00	0,00	0,00%	0,00
28	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Transfer		0,00	0,00	0,00%	0,00
29	Jumlah Pendapatan Transfer		522.809.175.000,00	114.099.315.511,47	54,92%	512.025.235.201,51
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAMA	5.2.1.4				
31	Pendapatan Lain-lain	5.2.1.4.1	241.449.000,00	317.990.810,00	100,00%	0,00
32	Pendapatan Lain-lain	5.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sama		241.449.000,00	317.990.810,00	100,00%	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sama		12.146.241.116,00	18.584.477.000,00	100,00%	12.781.254.106,00
35	Jumlah Pendapatan		587.845.151.273,00	452.707.819.581,71	96,12%	514.213.186.130,46
36	PELAYANAN	5.2.2				
37	PELAYANAN	5.2.2.1				
38	Bantuan Operasional	5.2.2.1.1	418.212.520.886,00	310.896.209.155,00	97,97%	301.502.977.255,00
39	Bantuan Operasional Lain-lain	5.2.2.1.2	408.184.424.631,00	407.246.762.319,00	99,80%	27.267.388.478,00
40	Bantuan	5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00%	0,00
41	Bantuan	5.2.2.1.4	0,00	0,00	0,00%	0,00
42	Bantuan	5.2.2.1.5	4.005.000.000,00	4.005.000.000,00	100,00%	1.011.217.000,00
43	Bantuan Lain-lain	5.2.2.1.6	4.005.000.000,00	4.005.000.000,00	100,00%	4.005.000.000,00
44	Bantuan Lain-lain	5.2.2.1.7	47.1.000.000,00	478.071.835,00	99,59%	471.511.518.459,00
45	Jumlah Bantuan Operasional		434.602.947.517,00	420.116.701.099,00	96,66%	
46	PELAYANAN	5.2.2.2				
47	Bantuan Lain-lain	5.2.2.2.1	347.982.500,00	2.101.148.500,00	29,44%	412.410.700,00
48	Bantuan Lain-lain Lain-lain	5.2.2.2.2	2.142.673.428,00	6.111.485.045,00	100,00%	13.812.740.880,00
49	Bantuan Lain-lain Lain-lain	5.2.2.2.3	33.228.066.214,00	29.127.216.919,75	97,45%	29.785.998.221,00
50	Bantuan Lain-lain Lain-lain	5.2.2.2.4	70.554.082.878,00	65.506.818.605,00	97,45%	65.075.048.878,00
51	Bantuan Lain-lain Lain-lain	5.2.2.2.5	1.645.264.429,00	1.645.264.429,00	100,00%	1.645.264.429,00
52	Bantuan Lain-lain Lain-lain		0,00	0,00	0,00%	0,00
53	Jumlah Bantuan Lain-lain		112.862.403.617,00	97.859.940.429,75	92,76%	101.763.327.598,00

ERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

NO	URAIAN	Rugi	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	%	REALISASI 2013
50	BELANJA TAK TERKUR					
51	Denda Tak Terkur	5.2.2.3	1.250.000.000.00	1.099.000.000.00		1.085.771.155.00
52	Anggaran Rutanya Tak Terkur (S&T)		1.750.000.000.00	1.096.073.100.00		1.085.771.155.00
53	TRANSFER					
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN AP DESA	5.2.2.4				
55	Donasi untuk Pemak. ke Pura		0.00	0.00		0.00
56	Angka Haras Kerdus ke Desa		0.00	0.00		0.00
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		0.00	0.00		0.00
58	Bagi Hasil Transfer 2 sumber	5.2.2.4.1.1	18.800.000.000.00	11.073.053.136.00	58.79%	12.423.418.145.00
59	Angka Transfer Bagi Hasil ke Desa		18.800.000.000.00	11.077.009.818.00	58.79%	12.510.918.145.00
60	Saluran BUKU BUKU DAN TRANSFER		665.187.651.179.00	627.100.825.244.73	94.27%	616.874.355.105.00
61	SURPLUS/OFFSET		665.187.651.179.00	627.100.825.244.73		616.874.355.105.00
62	PERNYATAAN	5.2.3				
63	PERNYATAAN PERNYATAAN	5.2.3.1				
64	Pembayaran S&T PA	5.2.3.1.1.1	9.421.000.000.00	1.202.958.493.94		14.319.896.700.52
65	Pembayaran Dana Cadangan		0.00	0.00		0.00
66	Salut Dapadun Kerdus dan Dapadun		0.00	0.00		0.00
67	Pembayaran Denda Kerdus - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
68	Pembayaran Denda Kerdus - Pembayaran S&T	5.2.3.1.1.2	1.500.000.000.00	300.047.032.00		3.305.880.262.00
69	Pembayaran Denda Kerdus - Pembayaran S&T		75.000.000.000.00	0.00		0.00
70	Jumlah Pembayaran Pembayaran		97.079.456.144.00	1.503.156.613.94		18.346.877.063.52
71	PERNYATAAN PERNYATAAN	5.2.3.2				
72	Pembayaran Dana Cadangan		0.00	0.00		0.00
73	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
74	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
75	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
76	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
77	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
78	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
79	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
80	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
81	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
82	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
83	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
84	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
85	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
86	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
87	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
88	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
89	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
90	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
91	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
92	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
93	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
94	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
95	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
96	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
97	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
98	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
99	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00
100	Pembayaran Dana Cadangan - Pembayaran S&T		0.00	0.00		0.00



2.1RA



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012
[SETELAH AUDIT]

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Taht	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2 a.11.a)	2.041.000.593,00	2.413.931.005,00	167,27%	2.999.321.100,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2 a.11.b)	21.502.943.500,00	0.000.787.820,00	0,12%	6.897.025.547,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tersedia	5.2 a.11.c)	2.907.815.000,00	2.770.423.531,00	95,62%	2.841.949.000,00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.2 a.11.d)	2.294.534.771,00	3.641.784.254,34	158,72%	8.130.232.902,37
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		23.746.294.864,00	31.176.916.131,34	131,11%	17.970.519.304,36
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2 a.11.a1)	34.804.924.836,00	28.530.906.193,00	82,49%	31.277.278.011,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2 a.11.a12)	1.396.075.164,00	1.453.713.105,00	104,21%	1.371.687.953,00
11	Dana Alokasi Umum	5.2 a.11.a13)	436.542.180.000,00	436.542.110.000,00	100,00%	234.422.301.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.2 a.11.a14)	40.908.340.000,00	40.908.340.000,00	100,00%	42.116.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer		521.450.520.000,00	515.435.219.298,00	98,85%	459.158.098.954,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
16	Dana Operasi/Khusus		0,00	0,00	0,00%	0,00
17	Dana Pemeliharaan	5.2 a.11.b1)	71.115.900.000,00	71.115.900.000,00	100,00%	52.270.000.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		71.115.900.000,00	71.115.900.000,00	100,00%	52.270.000.000,00
19	PENDAPATAN					
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.2 a.21.c)	15.000.000.000,00	15.126.732.811,82	149,82%	2.767.989.740,78
21	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya		15.000.000.000,00	15.126.732.811,82	100,85%	2.767.989.740,78
24	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LAINNYA					
25	Bantuan Keuangan dan Program		0,00	0,00	0,00%	0,00
26	Bantuan Dana Pemeliharaan dari Program		0,00	0,00	0,00%	0,00
27	Bantuan Keuangan Lainnya dari Program		0,00	0,00	0,00%	0,00
28	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
29	Jumlah Pendapatan Transfer		407.566.450.000,00	601.677.827.109,82	147,63%	524.099.735.411,47
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
31	Pendapatan Hibah	5.2 a.21.a)	609.120.000,00	258.111.618,00	42,38%	117.990.850,00
32	Pendapatan Dana Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.2 a.21.b)	23.932.245.856,00	32.781.254.104,00	136,97%	13.959.477.400,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		13.932.245.856,00	32.781.254.104,00	235,13%	13.959.477.400,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		557.332.332.849,00	638.213.386.170,44	114,51%	555.701.825.565,71
36	BELANJA					
37	BELANJA OPERASI					
38	Belanja Pegawai	5.2 b.11.a)	859.949.764.741,00	950.987.127.089,00	110,59%	310.890.209.155,00
39	Belanja Barang dan Jasa	5.2 b.11.b)	500.403.641.254,00	500.059.856.275,00	99,93%	152.275.752.312,00
40	Bantuan		0,00	0,00	0,00%	0,00
41	Subsidi		0,00	0,00	0,00%	0,00
42	Hibah	5.2 b.11.c)	16.172.100.000,00	15.687.631.477,00	96,95%	4.618.087.800,00
43	Bantuan Sosial	5.2 b.11.d)	7.527.800.000,00	7.308.317.665,00	97,09%	2.738.651.875,00
44	Jumlah Belanja Operasi		484.527.905.495,00	468.987.945.106,00	96,80%	420.113.702.099,00
45	BELANJA MODAL					
46	Belanja Tanah	5.2 b.21.a)	350.000.000,00	34.528.000,00	9,86%	270.154.500,00
47	Belanja Perawatan dan Mesin	5.2 b.21.b)	20.038.952.563,00	19.103.636.130,00	95,33%	6.417.265.045,00
48	Belanja Gedung dan Aset	5.2 b.21.c)	24.118.504.611,00	28.362.086.141,00	117,60%	29.127.726.953,75
49	Belanja Jalan, jembatan dan bangunan	5.2 b.21.d)	75.115.684.540,00	54.613.678.754,00	72,71%	45.506.118.605,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2 b.21.e)	651.429.405,00	644.827.000,00	98,99%	1.537.875.300,00
51	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
52	Jumlah Belanja Modal		130.748.218.119,00	104.501.540.159,00	79,20%	92.859.590.409,75

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
53	BELANJA TAK TERDUGA					
54	Belanja Tak Terduga	5.3.b.3r	1.190.000.000,00	1.041.962.500,00	87,51%	1.099.370.100,00
55	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.190.000.000,00	1.041.962.500,00	87,51%	1.099.370.100,00
56	TRANSFER					
57	TRANSFER/BADU HASIL PENDAPATAN KE DESA					
58	Bagi Hasil Pajak ke Desa		0,00	0,00	0,00%	0,00
59	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		0,00	0,00	0,00%	0,00
60	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		0,00	0,00	0,00%	0,00
61	Bagi Hasil Transfer Lainnya	5.2.b.4i	15.475.900.000,00	15.474.697.995,00	99,99%	15.027.909.636,00
62	Jumlah Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa		15.475.900.000,00	15.474.697.995,00	99,99%	15.027.909.636,00
63	SUMAH BELANJA DAN TRANSFER		831.877.713.674,00	896.006.134.154,00	95,71%	127.100.629.288,76
64	SURPLUS/DEFISIT		17.629.882.790,00	48.671.817.905,15	276,11%	28.047.198.970,99
65	PEMBAYARAN					
66	PENERIMAAN PEMBAYARAN					
67	Aspek-aspek (SLRA)	5.2.c.1)	7.835.052.496,00	7.728.098.501,12	98,76%	7.002.826.569,04
68	Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
69	Hasil Pembiayaan Kelangkaan Daerah yang Dikembalikan		0,00	0,00	0,00%	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00%	0,00
71	Penerimaan kembali Pinjaman - Pinjaman Daerah	5.2.c.2	1.640.330.200,00	2.335.840.257,22	142,35%	403.447.638,00
72	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
73	Jumlah Penerimaan Pembayaran		9.475.382.696,00	10.063.938.758,34	106,23%	7.406.274.197,04
74	PENGELUARAN PEMBAYARAN					
75	Pembayaran Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
76	Pembayaran Modal (Bantuan) Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
77	Pembayaran Pinjaman, Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00%	0,00
78	Pembayaran Pinjaman Utang Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
79	Pembayaran Pembiayaan pada Pihak Ketiga	5.2.p.8	20.894.825.288,00	19.790.245.882,00	94,72%	24.014.043.992,00
80	Jumlah Pengeluaran Pembayaran		20.894.825.288,00	19.790.245.882,00	94,72%	24.014.043.992,00
81	PEMBAYARAN NETTO		177.429.687.790,00	223.198.892.817,13	125,86%	216.816.518.263,86
82	REALISASI PENDAPATAN ANGGARAN (GUPA)		8,00	25.484.595.082,27	318,06%	2.193.832.067,13



3. Laporan Realisasi Anggaran

 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No	URAIAN	REK	ANGGARAN PERUBAHAN 2014	2014	%	2013
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.101	5.417.000.000,00	5.401.708.400,00	100,00	3.418.821.000,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.102	12.277.274.000,00	12.333.457.917,40	100,77	9.330.750.000,00
5	Pendapatan Pajak Penghasilan Daerah dan Lain-lain yang Bersifat Pajak	5.2.1.103	15.125.000,00	15.125.000,00	100,00	2.779.472.500,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.2.1.104	11.383.635.100,00	11.418.641.221,20	100,49	5.001.764.750,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 + 4 + 5 + 6)	5.2.1	31.999.134.100,00	34.285.296.448,60	107,46	21.199.958.250,00
8	PENDAPATAN BUKLAH					
9	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - DANA PERUBAHAN					
10	uang dan barang milik	5.2.2.101.01	18.000.000.000,00	18.041.000.000,00	100,23	18.000.000.000,00
11	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.2.101.02	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	2.100.000.000,00
12	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.2.101.03	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	100,00	48.000.000.000,00
13	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.2.101.04	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
14	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (10 + 11 + 12 + 13)	5.2.2.101	118.100.000.000,00	118.141.000.000,00	100,04	118.100.000.000,00
15	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - PADAT					
16	uang dan barang milik	5.2.2.102	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
17	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (15 + 16)	5.2.2	119.200.000.000,00	119.200.000.000,00	100,00	119.200.000.000,00
18	PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH - DANA PERUBAHAN					
19	Pendapatan Asli Daerah	5.2.3.101	23.572.715.367,00	23.572.715.367,00	100,00	15.125.000.000,00
20	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.3.102	23.572.715.367,00	23.572.715.367,00	100,00	9.330.750.000,00
21	Pendapatan Pajak Penghasilan Daerah dan Lain-lain yang Bersifat Pajak	5.2.3.103	23.572.715.367,00	23.572.715.367,00	100,00	2.779.472.500,00
22	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (19 + 20 + 21)	5.2.3.101	70.718.146.034,00	70.718.146.034,00	100,00	27.635.222.500,00
23	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - PADAT					
24	uang dan barang milik	5.2.3.102	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
25	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (23 + 24)	5.2.3.102	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
26	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (22 + 25)	5.2.3	81.718.146.034,00	81.718.146.034,00	100,00	38.635.222.500,00
27	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (7 + 26)	5.2	119.917.236.134,00	120.003.442.482,60	100,01	59.835.180.750,00
28	PENDAPATAN BUKLAH					
29	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - PADAT					
30	uang dan barang milik	5.2.4.101	410.000.000.000,00	410.000.000.000,00	100,00	410.000.000.000,00
31	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.4.102	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
32	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.4.103	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
33	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.4.104	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
34	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (30 + 31 + 32 + 33)	5.2.4.101	455.000.000.000,00	455.000.000.000,00	100,00	455.000.000.000,00
35	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (34 + 35)	5.2.4	455.000.000.000,00	455.000.000.000,00	100,00	455.000.000.000,00
36	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (27 + 36)	5.2	165.917.236.134,00	165.003.442.482,60	99,45	105.335.180.750,00
37	PENDAPATAN BUKLAH					
38	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - PADAT					
39	uang dan barang milik	5.2.5.101	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
40	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.5.102	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
41	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.5.103	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
42	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.5.104	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
43	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (39 + 40 + 41 + 42)	5.2.5.101	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	100,00	44.000.000.000,00
44	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (43 + 44)	5.2.5	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	100,00	44.000.000.000,00
45	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (36 + 45)	5.2	170.017.236.134,00	169.003.442.482,60	99,41	109.775.180.750,00
46	PENDAPATAN BUKLAH					
47	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - PADAT					
48	uang dan barang milik	5.2.6.101	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
49	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.6.102	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
50	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.6.103	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
51	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.6.104	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
52	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (48 + 49 + 50 + 51)	5.2.6.101	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	100,00	44.000.000.000,00
53	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (52 + 53)	5.2.6	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	100,00	44.000.000.000,00
54	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (45 + 54)	5.2	174.017.236.134,00	173.003.442.482,60	99,43	113.775.180.750,00
55	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (46 + 55)	5.2	174.017.236.134,00	173.003.442.482,60	99,43	113.775.180.750,00
56	TRANSFER					
57	TRANSFER PENDAPATAN BUKLAH - PADAT					
58	uang dan barang milik	5.2.7.101	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
59	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.7.102	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
60	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.7.103	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
61	uang dan barang milik yang diterima dari	5.2.7.104	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
62	Jumlah Transfer Pendapatan Asli Daerah (58 + 59 + 60 + 61)	5.2.7.101	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	100,00	44.000.000.000,00
63	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (62 + 63)	5.2.7	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	100,00	44.000.000.000,00
64	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (55 + 64)	5.2	178.017.236.134,00	177.003.442.482,60	99,44	118.275.180.750,00

Calculus als Laplace-Formel für ungerichtete Bäume (siehe Disk. 1) ist äquivalent zur Laplace-Formel für



PEMERINTAH KABUPATEN SINGKANG
JALAN REALIS ANGOLAN
KANTOR YANG BARUK SAMPAN DEWAN 11 DESEMBER 2013 DAN 2014

[illegible]



UNTUK TANYA JAWAB BERKAITAN DENGAN ISI DOKUMEN TERSEBUT, SILAH KUNJUNGI:

No	Uraian	Ref	Anggaran	Revisi	%	Revisi 2017
1	PRINILAI ALAM					
1	PRINILAI ALAM	7.5.1.1				
1	PRINILAI ALAM	7.5.1.1.1	11.734.000.000	10.418.000.000	88,9	7.450.173.500.000
1	PRINILAI ALAM	7.5.1.1.2	24.000.000.000	23.876.121.000	99,5	15.557.623.000.000
11	PRINILAI ALAM	7.5.1.1.3	4.800.000.000	4.788.000.000	100,0	4.788.000.000.000
1	PRINILAI ALAM	7.5.1.1.4	20.215.104.400	20.215.104.400	100,0	20.215.104.400.000
1	PRINILAI ALAM	7.5.1.1.5	75.000.000.000	74.381.000.000	99,2	46.714.880.375.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2				
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1				
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.1	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.2	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.3	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.4	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.5	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.6	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.7	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.8	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.9	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.10	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.11	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.12	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.13	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.14	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.15	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.16	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.17	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.18	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.19	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.20	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.21	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.22	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.23	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.24	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.25	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.26	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.27	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.28	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.29	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.30	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0	4.000.000.000.000
2	PRINILAI ALAM	7.5.1.2.1.31	4.000.000.000	4.		

هذه الوثيقة هي ملكية خاصة للمكتب الوطني للمطارات. أي استعمال غير المصرح به يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAKASSAR
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017 DAN 2019
 [DETAIL RINCIAN]

NO	URAIAN	SKD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	PEMBAYARAN					
2	PEMBAYARAN BERSI DAN KEMAH	2.1.1.1				
3	Pembayaran Biaya Baku	2.1.1.1.1	9.965.000.000,00	9.518.025.189,00	95,53	30.187.822.707,00
4	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	27.878.129.029,00
5	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Pembayaran Biaya Baku Lainnya	2.1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

No	Uraian	Ref	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2018
16	PEMBAYARAN TAC PERSEKALIAN	75.1.4				
16.1	Acquisition of Land	75.1.4	214,840,000.00	10,000,000.00	4.66	217,339,000.00
16.2	Acquisition of Building	75.1.4	740,000,000.00	89,640,000.00	12.11	771,000,000.00
16.3	Acquisition of Equipment	75.1.4	540,000,000.00	247,444,500.00	45.82	540,000,000.00
16.4	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.5	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.6	Acquisition of Land	75.1.4				
16.7	Acquisition of Building	75.1.4				
16.8	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.9	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.10	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.11	Acquisition of Land	75.1.4				
16.12	Acquisition of Building	75.1.4				
16.13	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.14	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.15	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.16	Acquisition of Land	75.1.4				
16.17	Acquisition of Building	75.1.4				
16.18	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.19	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.20	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.21	Acquisition of Land	75.1.4				
16.22	Acquisition of Building	75.1.4				
16.23	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.24	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.25	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.26	Acquisition of Land	75.1.4				
16.27	Acquisition of Building	75.1.4				
16.28	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.29	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.30	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.31	Acquisition of Land	75.1.4				
16.32	Acquisition of Building	75.1.4				
16.33	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.34	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.35	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.36	Acquisition of Land	75.1.4				
16.37	Acquisition of Building	75.1.4				
16.38	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.39	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.40	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.41	Acquisition of Land	75.1.4				
16.42	Acquisition of Building	75.1.4				
16.43	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.44	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.45	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.46	Acquisition of Land	75.1.4				
16.47	Acquisition of Building	75.1.4				
16.48	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.49	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.50	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.51	Acquisition of Land	75.1.4				
16.52	Acquisition of Building	75.1.4				
16.53	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.54	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.55	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.56	Acquisition of Land	75.1.4				
16.57	Acquisition of Building	75.1.4				
16.58	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.59	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.60	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.61	Acquisition of Land	75.1.4				
16.62	Acquisition of Building	75.1.4				
16.63	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.64	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.65	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.66	Acquisition of Land	75.1.4				
16.67	Acquisition of Building	75.1.4				
16.68	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.69	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.70	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.71	Acquisition of Land	75.1.4				
16.72	Acquisition of Building	75.1.4				
16.73	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.74	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.75	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.76	Acquisition of Land	75.1.4				
16.77	Acquisition of Building	75.1.4				
16.78	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.79	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.80	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.81	Acquisition of Land	75.1.4				
16.82	Acquisition of Building	75.1.4				
16.83	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.84	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.85	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.86	Acquisition of Land	75.1.4				
16.87	Acquisition of Building	75.1.4				
16.88	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.89	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.90	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.91	Acquisition of Land	75.1.4				
16.92	Acquisition of Building	75.1.4				
16.93	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.94	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.95	Acquisition of Other Assets	75.1.4				
16.96	Acquisition of Land	75.1.4				
16.97	Acquisition of Building	75.1.4				
16.98	Acquisition of Equipment	75.1.4				
16.99	Acquisition of Vehicle	75.1.4				
16.100	Acquisition of Other Assets	75.1.4				

Realisasi 2018: 100% (Realisasi 2018: 100%)

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

L. LAMPIRAN KEUANGAN ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANGBANG
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Berkas 1 Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2017

Saluran Anggaran						
No	Uraian	Sal	ANGGARAN PADA 2017	2016	%	2017
1	PENDAPATAN - LRA					
2	PENDAPATAN ASAS DAERAH - LRA	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	50.789.000.000,00	38.841.118.000,00	130,34	38.841.118.000,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	38.737.840.000,00	21.271.948.000,00	182,13	21.271.948.000,00
5	Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	7.5.1.1.3	1.100.000.000,00	11.200.000.000,00	9,82	11.200.000.000,00
6	Lain-lain Pendapatan	7.5.1.1.4	44.974.375.000,00	38.544.852.000,00	116,70	38.544.852.000,00
7	Jumlah 1		135.601.215.000,00	99.656.918.000,00	136,04	99.656.918.000,00
8	PENYALURAN TRANSFER - LRA	7.5.1.2				
9	Transfer ke Pemerintah Kabupaten LRA	7.5.1.2.1				
10	Lurah Desa dan Desa	7.5.1.2.1.1	27.985.562.000,00	30.736.000.000,00	91,08	30.736.000.000,00
11	Desa Binaan Desa Binaan Desa Binaan	7.5.1.2.1.2	4.347.848.000,00	4.848.478.000,00	89,69	4.848.478.000,00
12	Desa Binaan Desa Binaan Desa Binaan	7.5.1.2.1.3	4.347.848.000,00	4.848.478.000,00	89,69	4.848.478.000,00
13	Desa Binaan Desa Binaan Desa Binaan	7.5.1.2.1.4	4.347.848.000,00	4.848.478.000,00	89,69	4.848.478.000,00
14	Desa Binaan Desa Binaan Desa Binaan	7.5.1.2.1.5	4.347.848.000,00	4.848.478.000,00	89,69	4.848.478.000,00
15	Jumlah 2		75.079.106.000,00	75.380.926.000,00	99,54	75.380.926.000,00
16	Jumlah 3		75.079.106.000,00	75.380.926.000,00	99,54	75.380.926.000,00
17	TRANSFER KE PEMERINTAH KABUPATEN LRA	7.5.1.2.2				
18	Transfer ke Pemerintah Kabupaten LRA	7.5.1.2.2.1	40.937.000.000,00	38.544.852.000,00	106,23	38.544.852.000,00
19	Transfer ke Pemerintah Kabupaten LRA	7.5.1.2.2.2	40.937.000.000,00	38.544.852.000,00	106,23	38.544.852.000,00
20	Transfer ke Pemerintah Kabupaten LRA	7.5.1.2.2.3	40.937.000.000,00	38.544.852.000,00	106,23	38.544.852.000,00
21	Transfer ke Pemerintah Kabupaten LRA	7.5.1.2.2.4	40.937.000.000,00	38.544.852.000,00	106,23	38.544.852.000,00
22	Transfer ke Pemerintah Kabupaten LRA	7.5.1.2.2.5	40.937.000.000,00	38.544.852.000,00	106,23	38.544.852.000,00
23	Jumlah 4		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
24	Jumlah 5		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
25	Jumlah 6		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
26	Jumlah 7		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
27	Jumlah 8		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
28	Jumlah 9		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
29	Jumlah 10		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
30	Jumlah 11		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
31	Jumlah 12		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
32	Jumlah 13		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
33	Jumlah 14		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
34	Jumlah 15		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
35	Jumlah 16		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
36	Jumlah 17		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
37	Jumlah 18		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
38	Jumlah 19		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
39	Jumlah 20		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
40	Jumlah 21		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
41	Jumlah 22		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
42	Jumlah 23		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
43	Jumlah 24		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
44	Jumlah 25		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
45	Jumlah 26		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
46	Jumlah 27		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
47	Jumlah 28		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
48	Jumlah 29		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
49	Jumlah 30		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
50	Jumlah 31		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
51	Jumlah 32		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
52	Jumlah 33		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
53	Jumlah 34		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
54	Jumlah 35		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
55	Jumlah 36		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
56	Jumlah 37		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
57	Jumlah 38		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
58	Jumlah 39		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
59	Jumlah 40		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
60	Jumlah 41		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
61	Jumlah 42		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
62	Jumlah 43		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
63	Jumlah 44		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
64	Jumlah 45		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
65	Jumlah 46		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
66	Jumlah 47		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
67	Jumlah 48		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
68	Jumlah 49		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
69	Jumlah 50		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
70	Jumlah 51		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
71	Jumlah 52		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
72	Jumlah 53		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
73	Jumlah 54		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
74	Jumlah 55		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
75	Jumlah 56		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
76	Jumlah 57		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
77	Jumlah 58		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
78	Jumlah 59		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
79	Jumlah 60		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
80	Jumlah 61		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
81	Jumlah 62		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
82	Jumlah 63		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
83	Jumlah 64		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
84	Jumlah 65		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
85	Jumlah 66		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
86	Jumlah 67		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
87	Jumlah 68		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
88	Jumlah 69		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
89	Jumlah 70		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
90	Jumlah 71		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
91	Jumlah 72		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
92	Jumlah 73		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
93	Jumlah 74		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
94	Jumlah 75		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
95	Jumlah 76		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
96	Jumlah 77		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
97	Jumlah 78		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
98	Jumlah 79		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
99	Jumlah 80		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00
100	Jumlah 81		163.858.106.000,00	152.819.700,00	107,23	152.819.700,00



PEMERINTAH KEMERDEKAAN SINGAPORE
 DEPARTMENT OF LANDS AND NEIGHBOURHOOD
 LAND TENDER BOARD (SINGAPORE)
 100, ROBINSON ROAD, SINGAPORE 068966

No	Uraian	Ref	Jumlah/Jan 2018	2018	N	2018
1	PERMINTAAN - IKA					
2	PERMINTAAN AKSI DAN TARIK - IKA	13.1.3	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	80,80	10.000.000.000,00
3	Perencanaan Biaya	13.1.3.1	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	57,70	10.000.000.000,00
4	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.2	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	23,10	10.000.000.000,00
5	Perencanaan Biaya Perencanaan dan Perencanaan	13.1.3.3	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
6	Line Item NAD yang lain	13.1.3.4	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	23,10	10.000.000.000,00
7	Jumlah 1	13.1.3.5	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	64,70	10.000.000.000,00
8	PERMINTAAN PERMINTAAN IKA	13.1.3.6	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	23,10	10.000.000.000,00
9	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.7	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
10	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.8	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
11	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.9	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
12	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.10	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
13	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.11	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
14	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.12	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
15	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.13	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
16	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.14	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
17	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.15	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
18	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.16	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
19	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.17	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
20	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.18	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
21	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.19	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
22	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.20	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
23	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.21	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
24	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.22	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
25	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.23	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
26	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.24	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
27	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.25	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
28	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.26	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
29	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.27	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
30	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.28	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
31	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.29	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
32	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.30	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
33	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.31	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
34	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.32	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
35	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.33	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
36	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.34	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
37	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.35	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
38	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.36	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
39	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.37	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
40	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.38	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
41	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.39	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
42	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.40	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
43	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.41	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
44	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.42	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
45	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.43	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
46	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.44	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
47	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.45	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
48	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.46	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
49	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.47	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
50	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.48	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
51	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.49	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
52	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.50	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
53	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.51	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
54	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.52	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
55	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.53	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
56	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.54	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
57	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.55	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
58	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.56	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
59	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.57	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
60	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.58	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
61	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.59	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
62	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.60	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
63	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.61	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
64	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.62	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
65	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.63	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
66	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.64	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
67	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.65	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
68	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.66	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
69	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.67	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
70	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.68	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
71	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.69	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
72	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.70	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
73	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.71	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
74	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.72	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
75	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.73	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
76	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.74	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
77	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.75	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
78	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.76	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
79	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.77	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
80	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.78	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
81	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.79	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
82	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.80	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
83	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.81	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
84	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.82	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
85	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.83	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
86	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.84	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
87	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.85	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
88	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.86	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
89	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.87	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
90	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.88	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
91	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.89	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
92	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.90	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
93	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.91	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
94	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.92	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
95	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.93	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
96	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.94	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
97	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.95	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
98	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.96	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
99	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.97	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
100	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.98	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
101	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.99	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00
102	Perencanaan Biaya Operasional	13.1.3.100	17.497.875.140,00	10.000.000.000,00	19,00	10.000.000.000,00

No.	Uraian	Ruf	ANGGARAN 2010	2009	%	2010
60	TRANSFERS BANTUAN KEUANGAN	75.3.2.2				
61	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.1				
62	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.2				
63	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.3				
64	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.4				
65	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.5				
66	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.6				
67	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.7				
68	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.8				
69	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.9				
70	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.10				
71	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.11				
72	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.12				
73	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.13				
74	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.14				
75	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.15				
76	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.16				
77	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.17				
78	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.18				
79	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.19				
80	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.20				
81	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.21				
82	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.22				
83	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.23				
84	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.24				
85	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.25				
86	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.26				
87	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.27				
88	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.28				
89	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.29				
90	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.30				
91	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.31				
92	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.32				
93	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.33				
94	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.34				
95	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.35				
96	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.36				
97	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.37				
98	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.38				
99	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.39				
100	Saluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	75.3.2.2.40				

Jumlah total transfer bantuan sosial ke daerah yang telah diproses dan disalurkan ke daerah





PENYERAH KEMUKATAN BERKAS
LAPORAN PENELITIAN DENGAN
UNTUK TUGAS YANG BERHUBUNG DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2019
(1-2018)

[illegible]

[illegible]

BAB I DEWI UTARI 105731110117

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 digilibadmin.unismuh.ac.id (Internet Sources) 5%
- 2 Mestika F.L Ang, Ernie B. Angoi, Hendrik Manosson. "HUBUNGAN SUMBER PENDAPATAN TERDAFTAR DENGAN MODAL PADA ANGGARAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON", GONGGONG CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016. 2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude references



BAB II DEWI UTARI 105731110117

OVERALL SIMILARITY

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

RELEVANT SOURCES



digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

7%



Submitted to unisa shah kopmespro

Student Paper

2%



repository.widyadarmakalimantan.ac.id

Source

2%

Exclude quotes

OR

Exclude bibliography



UNIVERSITAS

MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



★

BAB IV DEWI UTARI 105731110117

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



digilibadmin.unismuh.ac.id



jurnal.unsyiah.ac.id

7%

3%



BAB V DEWI UTARI 105731110117



PROBATION (EXCLUDED)

es.scribd.com

5%





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 861593, Fax. (0411) 863288

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dewi Utari
NIM : 105731110117
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Baku
1	Bab 1	6%	10 %
2	Bab 2	10%	25 %
3	Bab 3	7%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Dengan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 15 Desember 2021
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.


Nursyah, S.Han, M.P.
NBM. 964.501

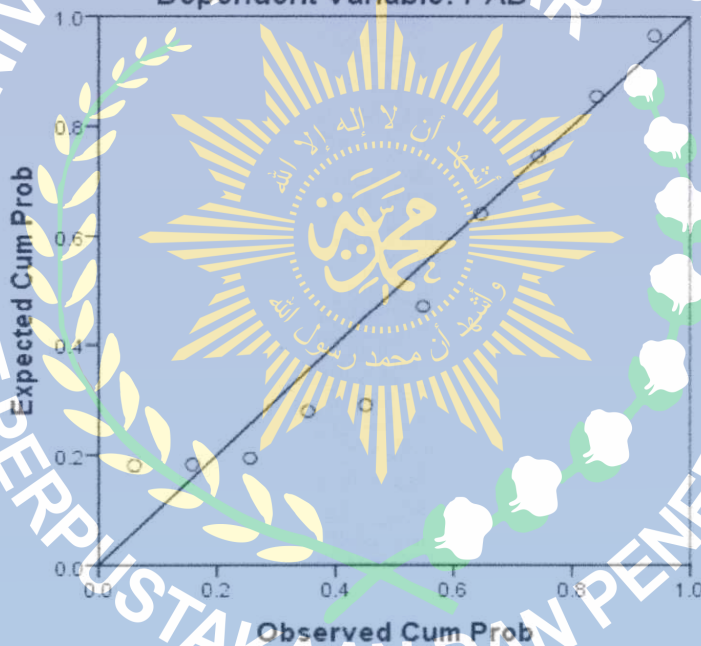
Jl. Sultan Alauddin no.259 Makassar 90222
Telepon: (0411) 866972, 861 593, fax (0411) 865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

1. Stastistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	10	9.29E+10	3.30E+11	1.7478E+11	7.83000E+10
Pendapatan Asli Daerah	10	1.35E+10	9.97E+10	5.1036+10	2.89051E+10
Valid N (listwise)	10				

2. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PAD

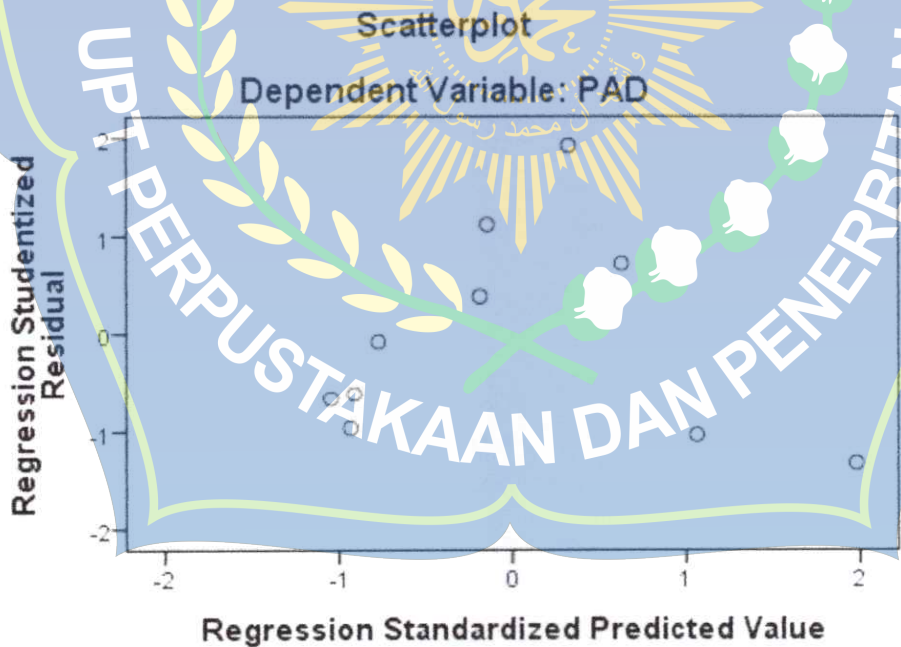


Sumber : Output SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	22216038860.00000
Most Extreme Differences	Absolute	.221
	Positive	.221
	Negative	-.167
Test Statistic		.221
Asymp. Sig. (2-tailed)		.181 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Output SPSS

3. Uji heteroskedastisitas



4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Belanja Modal	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Output SPSS

5. Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9762849742	1.905E+10		.512
	Belanja Modal	.236	.100	.640	.046

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

BIOGRAFI PENULIS



Dewi Utari, lahir pada tanggal 16 November 1999 di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari 3 bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Udin T dan Ibu Sumiati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 54 Kalosi dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 3 Alla dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Enrekang dengan mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Strata Satu (S1). Penulis menyelesaikan kuliah S1 pada tahun 2021, dan berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah didepan penguji yang berjudul "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang" dan mendapatkan gelar S.Ak.